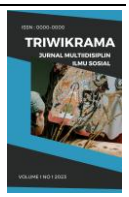
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Admi Lidya Sari
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history:
Received January 2026
Revised January 2026
Accepted January 2026
Available online January 2026

Email:
admilidya@ulm.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Implementasi kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan efektivitas kebijakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis pola hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Studi ini menggunakan metode penelusuran literatur secara sistematis terhadap artikel ilmiah terakreditasi SINTA 1–3 yang terbit pada periode 2020–2025. Proses seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi yang disajikan melalui diagram PRISMA. Hasil kajian terhadap artikel terpilih menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama, yaitu: (1) keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas; (2) lemahnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga; (3) struktur birokrasi yang kurang efektif; (4) kelemahan regulasi dan tata kelola kebijakan; (5) faktor sosial budaya masyarakat; serta (6) kendala teknis operasional. Temuan penelitian menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi kelembagaan merupakan faktor penghambat yang paling dominan. Studi ini memberikan kontribusi teoretis berupa pemetaan konseptual hambatan implementasi kebijakan, serta kontribusi praktis sebagai dasar rekomendasi perbaikan tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

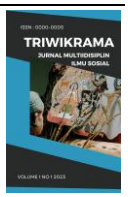
Kata Kunci : Implementasi kebijakan publik, hambatan kebijakan, systematic literature review, PRISMA

PENDAHULUAN

Kebijakan publik berperan sebagai sarana utama pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya menata, mengelola, dan mengarahkan kehidupan sosial agar selaras dengan kepentingan bersama (Martono, 2019). Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses implementasinya (Sutmasa, 2021). Tidak jarang kebijakan yang telah disusun secara baik pada tahap perencanaan gagal mencapai tujuan karena menemui berbagai hambatan pada tahap pelaksanaan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang dinamis dan kompleks karena melibatkan banyak pihak, sumber daya, serta mekanisme kelembagaan yang saling berkaitan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor politik, sosial, hukum, dan ekonomi (Kholifah et al., 2022).

Dalam praktiknya di Indonesia, implementasi kebijakan publik kerap menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun sosial-kultural. Hambatan-hambatan tersebut sering kali menyebabkan kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan kebijakan tidak tercapai sebagaimana mestinya.



Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan dalam implementasi kebijakan di Indonesia cenderung berulang pada berbagai sektor, seperti transportasi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya dukungan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta struktur birokrasi yang belum efektif (Sarifuddin & Mahmud, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi kebijakan bukan hanya persoalan yang bersifat kasuistik, melainkan merupakan permasalahan sistemik yang memerlukan kajian dan pemetaan secara menyeluruh.

Walaupun kajian mengenai implementasi kebijakan publik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor atau kasus tertentu secara terpisah. Akibatnya, belum tersedia sintesis pengetahuan yang terintegrasi mengenai pola umum hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai bentuk dan karakteristik hambatan sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian yang mampu mengintegrasikan temuan-temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan karena mampu menyajikan pemetaan literatur yang komprehensif dan didasarkan pada bukti ilmiah (Effendy et al., 2025). Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian serta merumuskan rekomendasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada bidang yang terus berkembang secara dinamis seperti kebijakan publik. Dengan menerapkan prosedur PRISMA, penelitian ini berupaya menyintesis hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi, khususnya SINTA 1–3, guna memperoleh gambaran yang valid dan berkualitas mengenai persoalan implementasi kebijakan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki arti penting baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, terutama terkait pemahaman mengenai faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan. Sementara itu secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:
(1) mengidentifikasi berbagai bentuk hambatan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia; dan
(2) mengklasifikasikan hambatan-hambatan tersebut ke dalam kategori tematik berdasarkan hasil kajian literatur secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi dan mensintesis berbagai temuan penelitian mengenai hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu menyajikan

proses kajian literatur secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dan komprehensif (Kitchenham & Brereton, 2013). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan, mengevaluasi, serta mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian (Maulana et al., 2024)

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah daring, antara lain Google Scholar, Garuda, SINTA, serta portal jurnal nasional terakreditasi. Pencarian artikel dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti *implementasi kebijakan publik*, *hambatan implementasi kebijakan*, *policy implementation*, dan *barriers to policy implementation*. Untuk memperoleh temuan yang relevan dan aktual, penelitian ini membatasi artikel pada rentang waktu publikasi tahun 2020–2025. Pembatasan waktu ini dilakukan agar hasil kajian mencerminkan dinamika kebijakan publik terkini di Indonesia.

Seleksi artikel dilakukan dengan mengikuti tahapan dalam diagram PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu *identification, screening, eligibility,* dan *inclusion* (Page et al., 2021).Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber basis data. Selanjutnya, pada tahap *screening*, dilakukan penyaringan awal berdasarkan judul dan kata kunci untuk menyeleksi artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap *eligibility* dilakukan dengan menilai kesesuaian isi artikel secara lebih mendalam berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Artikel yang memenuhi seluruh kriteria kemudian dimasukkan ke tahap akhir (*included*) sebagai bahan utama analisis.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel membahas secara spesifik implementasi kebijakan publik di Indonesia, (2) memuat informasi mengenai faktor atau hambatan implementasi kebijakan, (3) diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1–3, (4) dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2025, serta (5) tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*). Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak relevan dengan tema hambatan implementasi kebijakan, (2) artikel berupa opini, editorial, atau tinjauan singkat, (3) publikasi selain jurnal ilmiah (seperti skripsi atau laporan), dan (4) artikel yang tidak menyediakan informasi metodologi dan temuan secara jelas.

Data dari artikel yang telah lolos tahap seleksi selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkategorikan pola-pola utama dari berbagai temuan penelitian (Studi et al., 2018).Setiap informasi mengenai hambatan implementasi kebijakan dikodekan dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, seperti hambatan sumber daya, kelembagaan, koordinasi, sosial masyarakat, serta hambatan teknis operasional. Hasil analisis tematik tersebut kemudian disintesis untuk memperoleh gambaran umum mengenai kecenderungan hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia.

Untuk menjamin validitas dan transparansi penelitian, seluruh tahapan proses seleksi literatur didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk diagram PRISMA. Diagram tersebut menggambarkan alur penelusuran dan penyaringan artikel mulai dari jumlah artikel awal yang ditemukan hingga jumlah artikel akhir yang dianalisis. Penggunaan prosedur PRISMA dalam penelitian ini bertujuan agar proses SLR dapat dilakukan secara terstandar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Page et al., 2021).

Dengan langkah-langkah metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis temuan yang valid, sistematis, dan komprehensif mengenai berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada. (Arafat, 2023). Anggara mengartikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. (Dewi, 2022)

Dalam prosesnya, kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Yogopriyatno et al., 2024). Di antara tahapan tersebut, implementasi kebijakan sering dianggap sebagai tahap yang paling krusial karena menjadi jembatan antara rencana kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara efektif.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2022). Implementasi kebijakan publik adalah alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara etimologis, istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement,* yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta *to practical effect*, yang mengacu pada menimbulkan suatu efek atau dampak. (Sinathria Maharaksa et al., 2025). Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi melibatkan berbagai elemen seperti organisasi pelaksana, sumber daya, prosedur kerja, serta lingkungan sosial politik. (Kertati et al., 2023)

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni, kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, partisipasi dan keterlibatan aktif, kapasitas institusional yang memadai, pemantauan dan evaluasi yang sistematis, sinkronisasi dengan konteks dan kapasitas lokal (Arafat, 2023)

Menurut pandangan George C. Edwards, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi (Dewi, 2022).

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam kajian administrasi publik, hambatan implementasi kebijakan sering dijelaskan melalui berbagai teori. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat antara lain dari isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi (Marwiyah, 2022). Selain itu, ada beberapa tantangan umum dalam implementasi kebijakan seperti ketidaksesuaian prioritas dan kepentingan, keterbatasan sumber daya, kapasitas institusional yang terbatas, koordinasi yang tidak efektif, perlawanan atau resistensi, konteks sosial dan budaya (Arafat, 2023). Pelaksanaan kebijakan publik tidak terlepas dari tingkat kompleksitas yang tinggi serta berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menekankan keterlibatan masyarakat secara atif serta integrasi antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan lokal (Listiana et al., 2025).

4. Kerangka Konseptual Penelitian

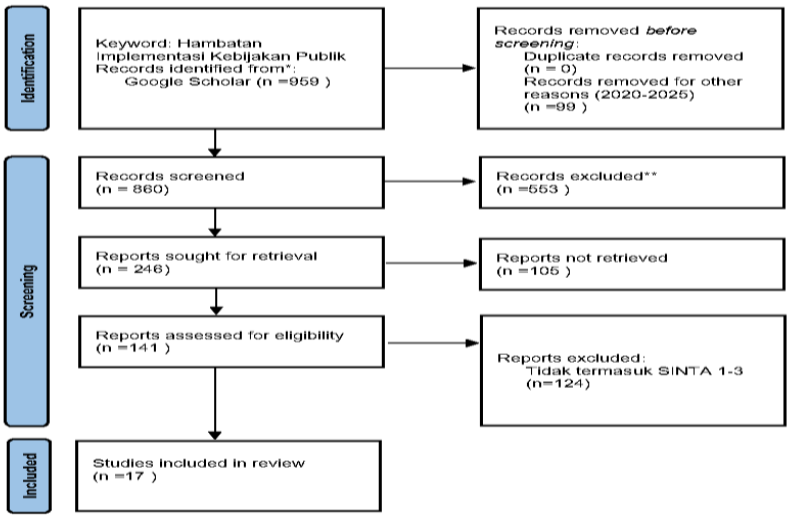
Berdasarkan berbagai teori tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang memandang hambatan implementasi kebijakan publik sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Hambatan Sumber Daya – mencakup keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas pendukung;
2. Hambatan Kelembagaan dan Birokrasi – meliputi kelemahan regulasi, struktur organisasi, dan tata kelola;
3. Hambatan Koordinasi dan Komunikasi – berkaitan dengan sinergi antaraktor serta efektivitas penyampaian informasi kebijakan;
4. Hambatan Sosial Masyarakat – mencakup rendahnya pemahaman, partisipasi, dan resistensi publik;
5. Hambatan Teknis Operasional – terkait keterbatasan infrastruktur, prosedur, dan mekanisme kerja di lapangan.

Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan temuan-temuan literatur mengenai hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan hambatan yang lebih sistematis dan komprehensif.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PEMBAHASAN



Gambar 1. SLR dengan metode PRISMA, diolah oleh penulis (2026)

Hasil kajian literatur melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia bersifat multidimensional.

Tabel 1. Artikel Yang Lolos Seleksi Berdasarkan Kriteria

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Jurnal	Temuan Hasil
1	AY Katili, NS Tueno	Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo	Publik: Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2020) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan publik dalam pengaturan Bentor meliputi rendahnya kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas, lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta kurangnya pengawasan akibat keterbatasan petugas di lapangan.
2	JGB No	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 19 No. 2 (2022) Terakreditasi SINTA 2	Hambatan implementasi kebijakan tersebut meliputi penggunaan anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan Intermediete Treatment Facilities (ITF), serta pengaruh faktor politik daerah.

3	F Nazar, S Mochtar, E Sufianti…	Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta	Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2021) Terakreditasi SINTA 3	Kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata kelola pengelolaannya.
4	A Mamulaty, ZA Rengifurwarin…	Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan	JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Vol. 5 No. 1 (2024) Terakreditasi SINTA 3	hambatannya yaitu kekurangan SDM
5	T Dunggio, S Darman	Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo	Journal of Economic, Business, and Adminsitration (JEBA) Vol. 1 No. 1 (2020) Terakreditasi SINTA 2	Hambatan implementasi kebijakan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung serta rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya kelompok tani, terhadap kebijakan tersebut.
6	HS Nugroho	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman	Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 2 (2020) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan terjadi karena proses penginputan data aset memerlukan waktu yang lama serta banyaknya jumlah aset yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

7	H Agustino, ERP Widodo	Analisis implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Malang	Sospol: Jurnal Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2022) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Malang meliputi kurangnya sinergitas program antar OPD dan mitra terkait, serta belum meratanya distribusi program ke seluruh desa/kelurahan dan sektor pendukung, termasuk lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
8	AE Puteri, E Yuliarti, NP Maharani…	Analisis implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia	Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022) Treakreditasi SINTA 2	keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin
9	E Dalilah, V Juwono	Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program	INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (2) (2021) Terakreditasi SINTA 2	Hambatan implementasi kebijakan LHKPN meliputi ketidaksempurnaan kerangka hukum, kelemahan badan pelaksana, verifikasi yang belum optimal, konteks kelembagaan yang belum matang, rendahnya dukungan dan kesadaran pejabat publik, serta minimnya minat dan dukungan masyarakat luas.
10	AT Maulana	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Badan Meteorologi …	JURNAL SIGNAL Volume 10 No 2 (2021) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan meliputi keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia pada unit PTSP, serta minimnya fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan komunikasi antar unit kerja dan UPT daerah.
11	S Khasna	Evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan	Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 4 , No. 1 (2021)	Hambatan implementasi kebijakan terletak pada keterbatasan kapasitas IPAL Komunal yang belum mampu menampung seluruh limbah batik serta persebaran lokasi industri yang berjauhan sehingga

			Terakreditasi SINTA 3	sebagian pelaku usaha tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengelolaan limbah pemerintah.
12	MA Firdaus, R Ristiawati, S Saphira	Formulasi kebijakan pelaksanaan perlindungan kawasan sempadan sungai di kota Banjarmasin	Jurnal IUS Contendum Vol. 6 No. 2 (2021) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan terjadi karena kondisi sosial budaya masyarakat Kota Banjarmasin yang sejak lama bermukim di pinggiran sungai serta ketentuan jarak sempadan sungai yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis kota yang sempit dan memiliki banyak anak sungai.
13	AN Azizah, I Prabawati	Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Journal PUBLIKA Vol 9 No 4 (2021) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen program, koordinasi antar pelaksana yang belum optimal dalam struktur birokrasi, serta komunikasi yang belum maksimal kepada sasaran program.
14	S Syafaruddin, M Mesiono…	Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri	Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 01 (2022) Terakreditasi SINTA 2	Tidak ada hambatan
15	NN Syariyah, T Nur, D Meigawati	Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Tentang Bursa Kerja Di Dinas	Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)	Hambatan implementasi kebijakan bursa kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi terletak pada aspek komunikasi dan sumber daya manusia yang telah berjalan tetapi belum

		Tenaga Kerja Kota Sukabumi	Terakreditasi SINTA 3	optimal sehingga memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah.
16	DK Arif, M Sondakh, FVIA Koagouw	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado)	Acta Diurna Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2020) Terakreditasi SINTA 3	Hambatan implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang belum efektif dengan masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan fasilitas akibat ketidaksesuaian latar belakang keilmuan, serta struktur birokrasi yang berbelit dan pengambilan keputusan yang kurang tegas sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan maksimal.
17	B Giyanto, PKS Hidayah, K Julizar…	Implementasi kebijakan komunitas belajar dalam Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia	Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2023) Terakreditasi SINTA 2	Hambatan implementasi kebijakan meliputi fasilitas komunitas belajar yang belum memadai, rendahnya motivasi tenaga pendidik untuk berpartisipasi, kurangnya dukungan nyata dari kepala sekolah, belum jelasnya topik pembahasan, serta belum adanya evaluasi berkala terhadap kegiatan komunitas belajar.

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu hambatan sumber daya, kelembagaan, koordinasi dan komunikasi, sosial masyarakat, serta hambatan teknis operasional. Pembahasan berikut menguraikan masing-masing kategori tersebut secara lebih mendalam.

1. Hambatan pada Aspek Sumber Daya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan faktor penghambat yang paling dominan dalam implementasi kebijakan publik. Banyak kebijakan tidak dapat berjalan optimal karena kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya jumlah petugas pelaksana, serta minimnya dukungan anggaran (Temuan 4; Temuan 5). Kondisi

ini diperparah dengan rendahnya kapasitas aparatur dalam mengelola program serta kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan komunikasi antar unit kerja (Temuan 10).

Permasalahan serupa juga ditemukan pada pelaksanaan kebijakan bursa kerja di Kota Sukabumi, di mana aspek komunikasi dan kualitas sumber daya manusia dinilai belum optimal sehingga menghambat keberhasilan program (Temuan 16). Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis aparatur akibat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas yang diemban turut menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan (Temuan 16).

2. Hambatan pada Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

Selain faktor sumber daya, kelemahan kelembagaan juga menjadi penghambat penting dalam implementasi kebijakan. Beberapa kebijakan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata kelola pelaksanaannya (Temuan 4). Pada kebijakan LHKPN, hambatan muncul dalam bentuk ketidaksempurnaan kerangka hukum, lemahnya badan pelaksana, serta sistem verifikasi yang belum optimal (Temuan 9).

Struktur birokrasi yang berbelit-belit dan proses pengambilan keputusan yang kurang tegas juga menjadi kendala yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan maksimal (Temuan 16). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kualitas tata kelola yang mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3. Hambatan pada Aspek Koordinasi dan Komunikasi

Lemahnya koordinasi antaraktor pelaksana merupakan hambatan signifikan yang banyak ditemukan dalam berbagai sektor kebijakan. Pada kebijakan pengaturan Bentor, kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian menyebabkan penegakan aturan tidak berjalan efektif (Temuan 1). Permasalahan serupa juga terjadi dalam pembangunan Intermediete Treatment Facilities (ITF), di mana koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta masih lemah serta dipengaruhi oleh faktor politik daerah (Temuan 2).

Dalam kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Malang, kurangnya sinergitas antar-OPD dan mitra strategis menyebabkan program tidak terdistribusi secara merata (Temuan 7). Selain koordinasi, komunikasi kebijakan kepada masyarakat juga sering kali belum efektif sehingga sasaran program tidak memahami tujuan kebijakan dengan baik (Temuan 13; Temuan 16). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan komunikasi antaraktor yang terlibat.

4. Hambatan pada Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Faktor sosial masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa kebijakan menghadapi hambatan karena rendahnya pemahaman dan partisipasi publik, seperti minimnya pemahaman kelompok tani terhadap kebijakan yang diterapkan (Temuan 5). Selain itu, keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin

menunjukkan bahwa persepsi publik dapat menjadi penghalang serius dalam keberhasilan suatu program (Temuan 8).

Aspek sosial budaya lokal juga memengaruhi efektivitas kebijakan. Pada kasus Kota Banjarmasin, kebiasaan masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai menyebabkan kebijakan penataan sempadan sungai sulit diterapkan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis dan budaya setempat (Temuan 12). Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat agar lebih mudah diterima dan dijalankan.

5. Hambatan pada Aspek Teknis dan Infrastruktur

Hambatan teknis operasional juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada pengelolaan aset desa, proses penginputan data yang memerlukan waktu lama serta banyaknya aset yang harus dimasukkan ke dalam sistem SIPADES menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan (Temuan 6). Di sektor lingkungan, keterbatasan kapasitas IPAL Komunal yang belum mampu menampung seluruh limbah serta lokasi industri yang tersebar menyebabkan fasilitas pengelolaan limbah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Temuan 11).

Pada sektor pendidikan, implementasi komunitas belajar mengalami hambatan berupa minimnya fasilitas pendukung, rendahnya motivasi tenaga pendidik, serta belum adanya evaluasi berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan (Temuan 17). Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur dan mekanisme teknis operasional merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Hambatan sumber daya, kelembagaan, koordinasi, sosial, dan teknis operasional saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, upaya perbaikan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas aparatur, perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, efektivitas struktur birokrasi, serta dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, hasil SLR ini memberikan gambaran empiris bahwa persoalan implementasi kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan publik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi kebijakan bersifat multidimensional dan terjadi hampir di seluruh sektor kebijakan. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu hambatan sumber daya, kelembagaan, koordinasi dan komunikasi, sosial masyarakat, serta hambatan teknis operasional.

Hambatan pada aspek sumber daya menjadi faktor yang paling dominan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung. Selain itu, kelemahan pada aspek kelembagaan dan tata kelola kebijakan, seperti ketidakjelasan regulasi, struktur birokrasi yang belum efektif, dan mekanisme kerja yang belum matang, turut menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurang efektifnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat menyebabkan banyak program tidak berjalan sesuai tujuan.

Faktor sosial masyarakat juga berperan penting sebagai penghambat implementasi kebijakan, terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman, partisipasi, serta resistensi publik terhadap kebijakan tertentu. Selain itu, hambatan teknis operasional seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas fasilitas, serta prosedur administrasi yang rumit semakin memperkuat kompleksitas permasalahan implementasi kebijakan di lapangan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, efektivitas kelembagaan, sinergi antaraktor, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan tata kelola kelembagaan, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif agar implementasi kebijakan publik di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Dewi, D. S. K. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK, Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.

Effendy, A., Sunarsi, D., & Wicaksono, W. (2025). Peluang Bisnis Gen Z di Era Digital : Tinjauan Literatur Sistematis. *Lensa Ilmiah - Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, *4*(2), 63–67.

Kertati, I., Harsoyo, Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., Werdiningsih, R., Karningsih, Hadiati, T. L., Bahrudin, A., Winarni, A. T., Nursalim, Cahyani, A. T., & Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, *4*, 164–174.

https://doi.org/https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.362

Kitchenham, B., & Brereton, P. (2013). A systematic review of systematic review process research in software engineering. *Information And Software Technologu*, *55*(12), 2049–2075.

Listiana, Y. D., Yumame, J., & Pugu, M. R. (2025). PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION : CHALLENGES AND SOLUTIONS IN ACHIEVING PEOPLE ' S WELFARE. *Multidiscpilinary Output Research For Actual and International*, *5*(1), 442–445.

Martono, B. S. (2019). TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, *1*(2), 101–111. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.307

Marwiyah, S. (2022). *Buku ajar Kebijakan Publik, Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelakasanaan, Analsiis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Universitas Panca Marga.

Maulana, T. D., Ananda, A., Nugroho, S., Suryaputra, B. A., Wulansari, A., Informasi, S., Anyar, G., & Review, S. L. (2024). TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS : MANAJEMEN SUMBER DAYA TI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN. *Jurnal Mahasiswa Informatika*, *8*(1), 57–62.

Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Lalu, M. M., Li, T., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hro, A., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., … Jose, T. J. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, *74*(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010

Sarifuddin, R., & Mahmud, S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Tunawisma dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 tun. *HULONDALO, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *4*, 785–801. https://doi.org/https://doi.org/10.59713/jipik.v4i2.1345

Sinathria Maharaksa, M., Dermawan Triharjono, H., Fadilah, F. N., Zahra, S. A., Solihat, K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*, 69–73. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320

Studi, P., Perpustakaan, I., Budaya, F. I., Diponegoro, U., & Tembalang, K. U. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan Dan Informasi*, *2*(3), 317–324. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ANUVA.2.3.317-324

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, *04*(01), 25–36. https://doi.org/https://doi.org/10.47532/JIC.V4I1.242

Yogopriyatno, J., Zulhakim, A. A., Gaus, M., Aziman, M. F., Rukmana, N. S., Sartika, Handayani, D. N., Agussalim, A., Alamsyah, A., Hidayah, N., & Azhari, F. A. (2024). *PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK*. Cendikia Publisher.